

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Luar Negeri menurut ahli hubungan Internasional seperti Joshua Goldstein adalah seorang pemerintahan setempat dalam hal ini actor yang ada untuk bisa menentukan bagaimana langkah negara tersebut dalam melakukan atau menentukan aksi mereka di dunia internasional (Rachmaniyah et al., 2014). Dalam menentukan suatu Kebijakan Luar Negeri nya suatu negara akan melihat pada Kepentingan Nasionalnya yang pada penjelasan Morghentau dalam buku Mohtar Mas'oed Kepentingan Nasional didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan yang dimiliki oleh actor tersebut dapat menjaga tujuan maupun kepentingan yang paling penting untuk negara tersebut demi menjaga bangsa dan negaranya (Mas'oed, 1990).

Fenomena Covid-19 yang hadir diantara masyarakat di awal 2020 terutama dari negara china yang kemudian menyebar ke hampir setiap negara yang ada membuat banyak dampak yang ditimbulkan baik dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang harus memiliki kebiasaan baru sampai beberapa negara yang harus memulai arah langkah kebijakan baru ditengah pandemi yang sedang menyerang agar bisa mengurangi dampak yang diberikan kepada negara negara yang ada terutama bagi Indonesia karena dampak yang diberikan oleh pandemi covid-19 ini menyerang hampir semua aspek dari berbangsa dan bernegara.

Covid-19 menjadikan momentum bagi beberapa negara salah satu nya adalah Indonesia untuk bisa mengubah kebijakan luar negerinya dalam mengatasi penyebaran pandemic covid-19. Kebijakan Luar Negeri yang dimaksud muncul setelah adanya kasus kemunculan pasien pertama yang dinyatakan positif covid-19, kasus pertama ini ditemukan

pada ibu dan anak pada tanggal 2 maret 2020 setelah melakukan perjalanan ke Malaysia beberapa waktu yang lalu (Ihsanuddin, 2020).

Sebelum terjadinya covid-19 yang ada Indonesia sempat memiliki beberapa fokus kebijakan luar negeri seperti peningkatan terkait diplomasi ekonomi dan fokus pengembangan perdagangan dengan negara lain, yang kedua adalah Indonesia memiliki fokus terkait kebijakan kedaulatan setelah pada tahun 2019 isu terkait laut natuna utara sempat mengalami ketegangan dengan china dan beberapa negara lain yang ada di ASEAN yang saling melakukan klaim terhadap wilayah tersebut menjadi wilayah negara mereka dan ditambah dengan banyaknya kapal nelayan asing yang masuk kedalam wilayah laut Indonesia.

Perlindungan WNI adalah fokus kebijakan luar negeri Indonesia yang ketiga pada saat sebelum pandemi covid-19, namun pada masa sebelum pandemic covid-19 pemerintah

Indonesia memfokuskan terkait kebijakan luar negeri di bidang perlindungan wni lebih mengarah terhadap pemenuhan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada WNI yang bekerja diluar negeri yang berjumlah hingga Rp.197 Milliar dan bantuan-bantuan terkait permasalahan hukum yang dimiliki oleh WNI yang berada di luar negeri hingga bisa membebaskan 33 hukuman mati dan bisa menyelamatkan dari tuntutan hukum dari 233 wni yang ada (Nugraha, 2020).

Fokus kebijakan luar negeri Indonesia sebelum terjadinya covid-19 adalah kepemimpinan internasional yaitu Indonesia sempat memiliki peran penting dalam beberapa posisi di dunia internasional salah satunya adalah Indonesia menempati dewan keamanan tidak tetap pbb dan saat Indonesia menempati posisi ini Indonesia menempatkan komitmennya untuk bisa menjaga perdamaian di wilayah konflik, Indonesia juga turut menyampaikan dalam pertemuan *ICRC* kalau Indonesia tidak hanya menempatkan pasukan

keamanan dengan persenjataan lengkap namun Indonesia berupaya untuk bisa menempatkan terutama pasukan perempuan untuk bisa memberikan pelayanan bagi para korban di wilayah konflik yaitu perempuan dan anak-anak (Kurmala, 2019).

Namun setelah adanya pandemi covid-19 Indonesia mengubah beberapa kebijakannya pada saat masa pandemi covid-19 yang kebanyakan adalah kebijakan luar negeri terkait diplomasi kesehatan dan kebijakan multilateral dengan negara-negara lain untuk bisa bersama-sama menangani pandemi covid-19. Yang pertama pemerintah Indonesia berfokus dalam penanganan WNI yang berada diluar negeri dengan cara memberikan alat pendukung kesehatan kepada WNI yang berada diluar negeri dan melakukan pemulangan kepada WNI yang berada di daerah yang membahayakan seperti Wuhan China (Asep Setiawan, 2020).

Melakukan respons terhadap covid-19 adalah salah satu fokus kebijakan luar negeri yang kedua dimana Indonesia berfokus untuk bisa menghubungi produsen alat-alat kesehatan terutama vaksin untuk bisa memastikan Indonesia cepat dalam menerima dosis vaksin namun disisi lain Indonesia juga mengupayakan adanya *dose sharing* (C. Indonesia, n.d.) antar negara agar negara-negara yang memiliki jumlah vaksin lebih banyak bisa menyalurkan ke negara yang lebih membutuhkan. Indonesia juga menjalin kerjasama dengan negara besar yang ada di Asia seperti Jepang dan Korea untuk bisa mendapatkan pasokan alat-alat medis dan mendapatkan bantuan untuk bisa menghadapi covid-19 (Purbatina & Hapsari, 2020).

Indonesia juga memfokuskan juga pada perdamaian walaupun saat pandemi covid-19 di tingkat regional dan internasional. Dalam tingkat regional Indonesia mengupayakan yang bernama *Foreign Minister Statement on the importance of Maintaining peace and*

stability pada tahun 2020 guna menjaga stabilitas keamanan di tingkat ASEAN (Negeri, 2020) dan di tingkat internasional Indonesia pada 28 Agustus 2020 adalah dengan cara mengeluarkan resolusi 2538 tentang pentingnya seorang perempuan dalam menjaga perdamaian. Resolusi ini juga akhirnya diadaptasi oleh *United Nation Security Council* (Fadillah et al., 2020) yang berfokus pada kesetaraan gender di wilayah konflik dan yang terakhir adalah Indonesia hadir pada saat perundingan perdamaian Afghanistan dan langsung membentuk *Indonesia-Afghanistan Women Solidarity* untuk bisa memajukan pemberdayaan perempuan di masing-masing negara antara Indonesia dan Afghanistan (S. K. R. Indonesia, 2020).

Secara singkat penulis akan menampilkan perbedaan antara fokus kebijakan luar negeri Indonesia dan setelah adanya pandemi covid-19 berikut ini:

Sebelum pandemi	Setelah pandemi covid-19
Kebijakan Perekonomian dan Diplomasi Ekonomi	Respons Indonesia terkait pandemi covid-19
Perlindungan WNI	Perdamaian dan Stabilitas internasional
Kebijakan Kedaulatan	Perlindungan WNI
Kepemimpinan Internasional	

Tabel 1. Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia sebelum dan setelah pandemi covid-19. (Sumber: pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Indonesia Tahun 2020 dan 2021)

Perbedaan yang dimiliki oleh pemerintahan Indonesia terutama dalam kebijakan luar negeri yang diambil sebelum dan setelah pandemi covid-19 yang sedikit banyak telah berubah masih banyaknya fokus kebijakan yang diambil menjadi beberapa kebijakan yang lebih fokus terhadap pandemi covid-19 sehingga memunculkan

pertanyaan mengapa Indonesia mengubah kebijakan luar negerinya pada pandemi covid-19?.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang didapatkan ialah “Mengapa Indonesia Merubah Kebijakan Luar Negeri Pada Masa pandemic covid 19?”

C. Kerangka Pemikiran

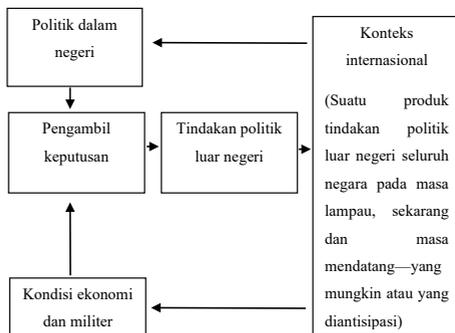
Pada Penelitian ini, Penulis menggunakan Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri.

1. Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri

Teori Pengambilan Kebijakan maupun Keputusan Luar Negeri masing-masing negara sangat erat kaitannya untuk bisa mendapatkan sebuah kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain, namun juga harus dipahami terdapat beberapa pertimbangan sebelum sebuah negara dalam menciptakan suatu Kebijakan Luar Negeri agar tepat sasaran dan

mengurangi suatu dampak yang dapat didapatkan oleh negara tersebut.

Menurut William D Coplin suatu negara dalam merumuskan suatu Kebijakan Luar Negeri terdapat beberapa pertimbangan yang mendalam yaitu : Politik Dalam Negeri, Kondisi Ekonomi dan Militer dan Konteks Internasional (Coplin & Marbun, 2003).



Gambar 1. Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri. (Sumber William D Coplin Hlm 30.)

a) Politik Dalam Negeri

Seperti yang dapat dilihat dalam gambar diatas salah satu

variable dalam pembuatan Kebijakan Luar Negeri adalah kondisi politik dalam negeri itu sendiri bahkan tidak jarang tidak hanya partai politik yang membuat isu politik dalam negeri agar bisa dijadikan menjadi salah satu pertimbangan Pembuatan Kebijakan Luar Negeri, elit Politik dalam suatu partai politik juga dapat menjadikan suatu isu untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan suatu Kebijakan Politik Luar Negeri (Debora & Sulaiman, 2019).

Namun dilain sisi suatu pembuat keputusan juga memerlukan suatu sosok yang disebut William D Coplin dalam bukunya yaitu *Policy Influencer* dimana tugas dari *Policy Influencer* itu sendiri agar suatu keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan dapat mendapatkan dukungan

masyarakat melalui pihak *Policy Influencer* terutama pada posisi politik dalam negeri namun *Policy Influencer* juga dapat ditemui dalam kasus Politik Luar Negeri (Coplin Marbun, 2003).

Dalam masa ini sudah bisa dilihat banyak negara yang sudah makin demokratis dalam sistem berbangsa dan bernegara meskipun setiap negara memiliki cara ataupun ciri khas dalam membuat kebijakan namun hal tersebut juga bisa membuat suatu pembuat kebijakan memiliki lebih banyak orang untuk dapat dijadikan referensi dalam mengambil suatu Kebijakan.

b) Kondisi Ekonomi dan Militer

Seorang pembuat kebijakan serta *policy influencer* sudah seharusnya paham terkait bagaimana mereka bisa

mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer dalam negerinya sebelum bisa membuat kebijakan luar negeri.

Pada saat ini perdagangan sudah menjadi salah satu salah satu point penting dalam suatu kebijakan luar negeri karena suatu negara sudah pasti akan melakukan perdagangan dengan negara lain yang pada saat ini sudah sangat beragam yang bisa diperjual belikan yang nantinya akan membentuk suatu neraca terkait bagaimana suatu negara bisa menjual barang ke negara lain dan membeli barang dari negara lain.

Selain terkait neraca dan penggunaan ekspor dan impor dari dan ke negara lain pada saat ini suatu instrument dimana

suatu negara dapat melakukan investasi ke negara lain juga menjadi bahan pertimbangan suatu negara dalam pembuatan kebijakan terhadap negara lain (Coplin & Marbun, 2003) sehingga sumber dana yang masuk dapat dikelola untuk menumbuhkan perekonomian dalam negeri.

Dalam sisi militer juga sangat penting dalam instrument pembuatan Kebijakan Luar Negeri karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam hal militer ini salah satunya adalah ada beberapa negara yang memiliki nuklir yang bisa digunakan dalam pembuatan senjata nuklir.

Salah satu contoh nyata terkait nuklir dalam sisi militer

ini dapat dilihat ketika perang dingin ditambah dengan krisis rudal di kuba tahun 1962. antara blok timur dan blok barat sudah hampir melaksanakan perang nuklir secara global (Couloumbis & Wolfe, 1999) karena kedua belah pihak sudah sulit dalam melakukan hubungan ataupun negosiasi antara satu dengan yang lain.

c) Konteks Internasional

Konteks Internasional dianggap penting dalam suatu negara bisa berhubungan entah dengan sistem maupun dengan setiap negara yang ada di lingkungan internasional hal tersebut juga dipengaruhi dengan bagaimana kepentingan nasional negara tersebut dapat dicapai dengan kebijakan luar negeri tertentu.

Hans J Morgenthau dalam buku William D Coplin juga berpendapat Kepentingan Nasional masih menjadi salah satu cara menentukan bagaimana sebuah negara bisa dapat mengatur segala tindakan yang actor tersebut lakukan.

Dalam konteks internasional itu sendiri terdapat beberapa hal yang didalam nya penting seperti ekonomi, geografis dan politis sehingga seperti gambar yang sudah ditambah kan diatas Konteks internasional juga bisa dilihat sebagai bagaimana sebuah dampak yang dihasilkan setelah pembuatan Kebijakan Luar Negeri namun juga bisa menjadikan suatu dampak tersebut bahan pembuatan

Kebijakan Luar Negeri kedepannya sebagai bahan evaluasi.

Dalam kondisi pandemi covid-19 Indonesia memang dalam sisi para pengambil kebijakan perlu juga untuk bisa mengatur kondisi politik dalam negerinya sendiri dalam buku William D Coplin dijelaskan tentang adanya *Policy Influencer* yang perannya cukup penting dimana seorang pengambil kebijakan bisa mendengarkan masukan dari para *Policy Influencer* sebelum bisa mengeluarkan kebijakannya nanti.

Dalam buku William D Coplin juga dijelaskan terkait banyaknya sisi yang bisa ikut menjadi *Policy Influencer* Beberapa diantaranya adalah Birokrat, Kepentingan, Massa dan Partai. Memang seorang pengambil kebijakan disini tidak harus mendengarkan bagaimana pendapat dari para *Policy Influencer* sebagai “narahubung” antara si pengambil

kebijakan dengan orang banyak. Namun yang harus diketahui terdapat berbagai timbal balik disini contoh yang bisa digunakan adalah para pengambil kebijakan ini memberikan timbal balik kepada para *Policy Influencer* ketika pikiran dan tenaga mereka dicurahkan saat pemilu. Sehingga selain mendapatkan kepentingan nasional nya para pembuat kebijakan perlu untuk bisa melihat dari sisi *Policy Influencer*.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang diambil pada saat awal pandemi covid 19 adalah mengurangi pergerakan manusia yang masuk dari dan keluar dari Indonesia paling tidak untuk menahan laju penyebaran virus covid-19 yang ada di Indonesia ditambah dengan keputusan pemerintah Indonesia yang tidak melakukan *Lockdown* karena alasan ekonomi yang harus tetap berjalan mengakibatkan Indonesia melakukan pembatasan ekspor terutama dari negara

yang memiliki resiko penyebaran seperti china (CNN Indonesia, 2020). Namun pembatasan tersebut dijamin oleh pemerintah tidak akan memiliki dampak terhadap ekonomi dalam negeri.

Pilihan Indonesia untuk tetap tidak melaksanakan *Lockdown* total untuk penanganan covid-19 seperti kebanyakan negara yang ada memang sedikit dilematis pasalnya anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan *Lockdown* memang terlampau tinggi sedangkan pemerintah melalui beberapa kebijakannya ingin tetap membatasi pergerakan manusia namun tidak melakukan lockdown. Imbas dari tidak baiknya penanganan covid-19 yang ada di Indonesia menyebabkan ada beberapa negara yang memasukkan Indonesia kedalam daftar negara yang tidak boleh untuk dikunjungi warga negaranya dan terancam akan diberi sanksi jika tetap berkunjung ke Indonesia, salah satu negara tersebut adalah Arab Saudi

(Firmansyah, 2021). Disisi lain jelas Indonesia juga membutuhkan hubungan yang baik dengan arab Saudi karena Indonesia memiliki kepentingan nasional hingga harus melakukan lobby dengan raja dan putra mahkota dengan Arab Saudi (Azanella, 2021) salah satunya salah satunya untuk bisa memberangkatkan jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

D. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan terkait kerangka pemikiran yang telah penulis jelaskan untuk menjawab rumusan masalah maka penjelasan sementara yang bisa diperoleh Mengapa Indonesia mengubah Kebijakan Luar Negeri dalam menangani pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Peran dari Birokratik influencer dan desakan dari DPR RI agar pemerintah mengubah kebijakan luar negeri untuk bisa lebih memfokuskan dalam upaya untuk pemenuhan alat-alat kesehatan

terkait covid-19 dan vaksinasi dalam bentuk diplomasi kesehatan.

2. Kondisi Ekonomi yang kurang stabil sebelum dan setelah adanya pandemi covid-19 yakni kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mulai mengalami penurunan sebelum adanya pandemi covid-19.
3. Pergeseran Politik Internasional pada tingkat multilateral yang memulai komitmen bersama-sama untuk bisa menghentikan covid-19.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan penelitian ilmiah ini metode yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk menulis penelitian ini adalah deskriptif dimana nantinya penulis akan menjelaskan permasalahan yang ada dengan mencari fakta-fakta yang ada

sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang lebih akurat terhadap penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan oleh penulis untuk menulis penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai macam judul, jurnal maupun website resmi yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahan dari data yang diambil untuk penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menghimpun data penelitian ini yaitu menggunakan sumber Pustaka (*Library Research*) yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut agar menghasilkan data yang lebih valid untuk menunjang penelitian ini.

4. Analisis Data

Hasil akhir yang didapatkan oleh penulis dari sumber-sumber yang

disebutkan diatas nantinya akan disusun oleh penulis secara sistematis dan logis kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

F. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang digunakan penulis untuk menulis penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan Luar Negeri Indonesia sebelum adanya pandemi Covid-19 dan bagaimana perubahan Kebijakan Luar Negerinya dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini. Penelitian ini juga mencakup beberapa kejadian maupun kebijakan yang diambil pada akhir 2018 dan awal 2021 namun tidak menutup kemungkinan jika menggunakan data diluar rentang waktu tersebut selama data yang ditujukan masih cukup relevan bagi penelitian ini.

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Luar Negeri di keadaan Pandemi seperti pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui apakah ada Perbedaan antara Kebijakan Luar Negeri sebelum dan saat terjadinya Covid-19.

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dan membantu penulis dalam melakukan penelitian ini maka penelitian ini akan terbagi kedalam Lima bab dengan urutan dan penjelasan sebagai berikut.

BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang Alasan Indonesia mengubah kebijakan luar negeri pada saat pandemi covid-19

BAB III berisi terkait penutup dan kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya dimana dalam bab ini berisi terkait ringkasan dari seluruh penelitian dengan memperlihatkan hubungan antara kerangka teori dan hipotesis yang sudah ada.

